



RENCANA KERJA

BADAN PENGHUBUNG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2023

Jl.Salak no.32 Kel.Guntur Kec.Setiabudi
Jakarta Selatan
12980
Telp. 021-8354284
Fax. 021-8319082
email : penghubung@kalbarprov.go.id
website : <http://penghubung.kalbarprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah ini diawali dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja yang kemudian untuk penyempurnaannya akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama seluruh stakeholders terkait dalam forum OPD sebagai wadah partisipatif guna menghasilkan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang akan menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Kata Pengantar yang memuat tentang ilustrasi dan sistematika laporan
2. Bab I Pendahuluan,
Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
3. Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun lalu.

Bagian ini berisi penjelasan mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penghubung Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

4. Bab III Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

Pada bagian ini menjelaskan mengenai telaahan rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dan sasaran-sasaran berdasarkan rumusan tujuan tersebut, berdasarkan isu-isu penting berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung.

5. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

Pada bagian ini memuat rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

6. Bab V Penutup

Bagian ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 ini bermanfaat bagi kita semua dan dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan Pembangunan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta, saran dan kritik sangat di harapkan guna perbaikan program, kegiatan serta penyempurnaan RENJA Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat kedepan.

Jakarta, 16 Januari 2023

Kepala Badan Penghubung Provinsi
Kalimantan Barat



ABDUL GANIS.H.

Penata Tingkat I
NIP. 197208211997031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	4
PENDAHULUAN	6
BAB I	
1.1 LATAR BELAKANG	6
1.2 LANDASAN HUKUM	8
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II	
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA BADAN	15
PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
TAHUN 2022	
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022	15
DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022	
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN	19
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS	39
DAN FUNGSI	
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL	43
2.5 PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	44
MASYARAKAT	
BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGHUBUNG	45
PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	45
3.2 TUJUAN DAN SASARAN KERJA	47
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023	58
BAB V PENUTUP	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta setiap tahunnya melaksanakan kegiatan pembangunan untuk mencapai kinerja yang telah di rencanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang sesuai dengan visi Kalimantan Barat yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat kalimantan barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Rencana kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke lima RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023. Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan akan sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja. Sedangkan Rencana Strategis menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selaras dengan Rencana Strategis, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif untuk tercapainya sasaran Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penghubung pada tahun-

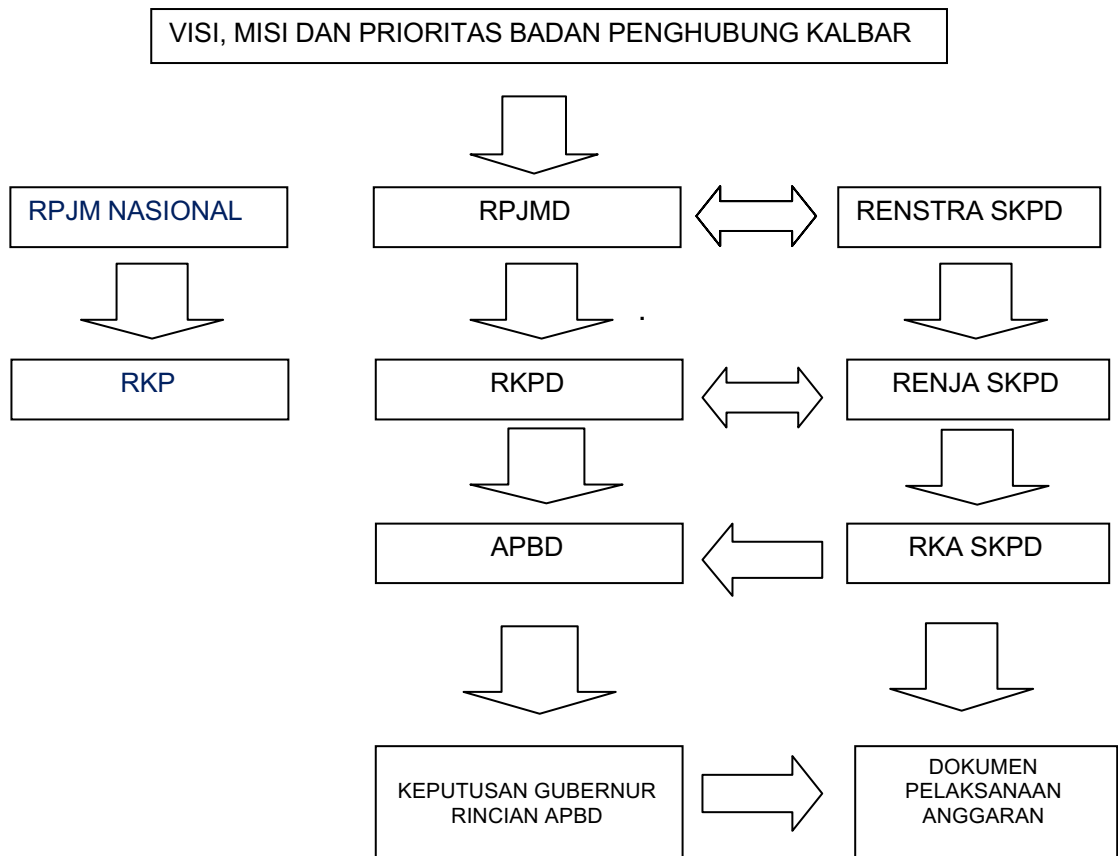
tahun sebelumnya. Sementara kendala yang terjadi saat program

tersebut dijalankan akan dievaluasi yang kemudian menjadi acuan perumusan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Badan penghubung untuk menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari berbagai pihak akan menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja yang nantinya akan menjadi program prioritas dalam RKPD.

Kebijakan dan rencana program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 disusun berdasarkan pendekatan pendekatan yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Didalam Rencana Kerja Badan Penghubung ini prioritas program dan kegiatan, penanggung jawab program, indikator hasil kerja serta pembiayaan diharapkan dapat mencapai sasaran pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023. Penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung ditujukan untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karenanya rencana kerja Badan Penghubung tahun 2023 harus selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi. Hubungan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dapat diilustrasikan seperti pada skema berikut :

HUBUNGAN DAN KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan serta Kalimantan Timur;
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat;
17. Surat Edaran Gubernur Kalimantan barat Nomor : 050/1772/PPEP-Bappeda Tentang Pembahasan Program dan Kegiatan Rancangan Akhir RPKD dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan penghubung berdasarkan rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 – 2023, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan dan antar tingkat pemerintah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, dengan demikian maka Rencana Kerja Badan Penghubung tahun

2023 menjadi dasar penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.

Jadi pada dasarnya maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat ini akan menjadi dasar penyusunan APBD tahun 2024 dan memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan / acuan kerja dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun kedepan.
- b. Sebagai acuan dalam menentukan lokasi kegiatan, menyusun indikator kinerja kegiatan, dan kelompok sasaran periode satu tahun kedepan.
- c. Sebagai acuan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun kedepan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 dibagi menjadi lima bab dan beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam RPJMD, keterkaitan antar dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RPJMD,

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah baik yang berskala Nasional maupun Lokal.

1.3 Maksud dan Tujuan

Mengemukakan organisasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengemukakan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta menguraikan fungsi Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam proses implementasi pembangunan Tahun 2023 di daerah.

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2022

Memuat hasil pencapaian kinerja dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Menjelaskan mengenai isu permasalahan menurut bidang-bidang pembangunan (program dan kegiatan) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

2.4 Review terhadap rancangan awal

Memuat ulasan rancangan awal Program dan Kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Memuat penjelasan tentang rancangan tujuan dan sasaran rencana kerja Tahun 2023

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023

Memuat penjelasan program dan kegiatan Badan Penghubung Tahun 2023

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Mengemukakan tentang rancangan program dan kegiatan Tahun 2023 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta.

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam Pelaksanaannya, demikian juga Renja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 akan disesuaikan dengan hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya (Renja Tahun 2023) yang meliputi 3 (tiga) hal yaitu :

1. Kebijakan Perencanaan Program dan Kegiatan.
2. Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan.
3. Hasil Rencana Program dan Kegiatan.

Penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

1. Penempatan Sumber Daya Manusia / sumber daya aparatur yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan tupoksinya.
2. Tujuan yang akan dicapai.
3. Sasaran dari program prioritas / core bisnis SKPD.
4. Kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan serta sub bidang-sub bidang yang akan mewujudkan kebijakan tersebut harus sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan.

Penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian Kinerja Tahun 2022 sebagai entry point dalam Penyusunan Perencanaan Tahun 2023.
2. Memperhatikan keberlanjutan (Sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Selama Tahun 2022 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Telah merealisasikan Anggaran APBD Sebesar Rp. 6.359.753.688,00 yaitu sebesar 97.35% dari total anggaran sebesar Rp. 6.533.166.903,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung : Rp. 3.134.779.711,00 (97.76%)
2. Belanja langsung : Rp. 3.224.973.977,08 (96.95%)
3. Belanja Barang dan jasa : Rp. 2.606.928.550,08
4. Belanja Modal : Rp. 294.339.000,00
5. Belanja Pemeliharaan : Rp. 323.706.427,00

Capaian angka partisipasi tahun 2022 sebesar 97.35 % sedangkan capaian program sesuai target anggaran sebesar 100 %. Ini berarti telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun Evaluasi hasil pelaksanaan program pembangunan dari urusan wajib tersebut antara lain :

1. Meningkatnya upaya pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerja : Jumlah asuransi kendaraan, jumlah perijinan

kendaraan dinas, jumlah jasa administrasi keuangan, jumlah penyediaan alat tulis kantor, jumlah barang cetakaan dan penggandaan, jumlah komponen instalasi listrik / penerangan kantor, jumlah penyediaan peralatan rumah tangga, jumlah pengadaan bahan bacaan, jumlah makan dan minum, jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah, jumlah tenaga keamanan dan kebersihan kantor, jumlah jasa administrasi keuangan, jumlah kegiatan sewa asrama.

2. Optimalnya fungsi sarana dan prasarana dengan indikator kinerja :
jumlah pengadaan AC, jumlah pengadaan perlengkapan / peralatan kantor, jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga, jumlah pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor, jumlah pemeliharaan bangunan gedung kantor, jumlah pemeliharaan bangunan gedung ADKB TMII, jumlah pemeliharaan taman, jumlah pemeliharaan mobil jabatan / mobil dinas, kendaraan operasional, jumlah pemeliharaan AC, jumlah pemeliharaan peralatan kantor, jumlah pemeliharaan sarpras studio dan komunikasi, jumlah pengadaan mebelair, jumlah pengadaan mesin pompa air, jumlah pemeliharaan asrama mahasiswa, jumlah pemeliharaan tempat parkir dan halaman, jumlah pemeliharaan pagar, jumlah pemeliharaan saluran air bersih, jumlah pemeliharaan mebelair, jumlah pemeliharaan mesin pompa air, jumlah pemeliharaan mesin pompa air, jumlah pemeliharaan perlengkapan rumah tangga, jumlah pemeliharaan asrama, jumlah rehab kanopi tempat parkir,

3. Meningkatnya upaya disiplin aparatur dengan indikator kinerja : Jumlah pengadaan pakaian dinas, jumlah pengadaan pakaian khusus, jumlah pengadaan kartu tanda pengenal pegawai.
4. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dengan indikator kinerja : Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan, terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, terlaksananya pembinaan jasmani dan rohani, terselenggaranya penyusunan analisis jabatan, tersedianya penyusunan penetapan kinerja.
5. Terwujudnya upaya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dengan indikator kinerja : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan, terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP), tersedianya Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung, tersedianya LPPD dan LKPJ Badan Penghubung, tersedianya RKA dan DPA Badan Penghubung,
6. Meningkatnya partisipasi dan kemitraan antar sektor dan pemda dengan indikator kinerja : Jumlah fasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur serta pejabat lainnya.
7. Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pemda dengan indikator kinerja : Terselenggaranya pengelolaan protokoler dan perjalanan Kepala Daerah / wakil dan Pejabat Daerah, jumlah pagelaran kesenian dan kebudayaan di Anjungan Kalimantan Barat TMII, jumlah pembayaran PBB asrama Mahasiswa, terwujudnya pengelolaan Mess Daerah, jumlah pelaksanaan kegiatan piket hari libur.

Dari hasil pelaksanaan program yang telah dilakukan pada tahun 2022 telah dicapai tingkat capaian kinerja sebesar 97.35 % hal ini menandakan bahwa semua kegiatan telah didistribusikan dengan baik dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dari dana APBD Tahun Anggaran 2022.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Salak Nomor 32 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan merupakan salah satu Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. yang terbentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dapat diuraikan beberapa aspek sebagai berikut :

1. ASPEK KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT:

a. KEDUDUKAN

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. TUGAS

Badan Penghubung mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan penghubung antar Pemerintah Provinsi dengan instansi pemerintah/lembaga-lembaga di Jakarta, mewakili pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengikuti rapat yang tidak bersifat teknis di Jakarta, fasilitasi dan pendayagunaan asrama mahasiswa dan asset Pemerintah Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya, penunjang kegiatan promosi, pengelolaan anjungan daerah, pemberian pelayanan penunjang kegiatan protokoler serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Badan Penghubung menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan program kerja di bidang Penghubung;
2. Perumusan kebijakan di bidang Penghubung;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penghubung;

4. Pengkoordinasian dibidang Penghubung;
5. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang Penghubung sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Penghubung;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penghubung;
8. Penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga-lembaga lainnya di Jakarta dan daerah lainnya;
9. Pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah Provinsi di Jakarta dan daerah lainnya;
10. Pembinaan masyarakat, mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
11. Pengelolaan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan asrama mahasiswa dan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
13. Pengelolaan Anjungan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta dan daerah lainnya;
14. Penunjang pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi sosial, budaya, ekonomi dan pariwisata berdasarkan kebijakan Gubernur;

15. Pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legialatif Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
16. Penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
17. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan.

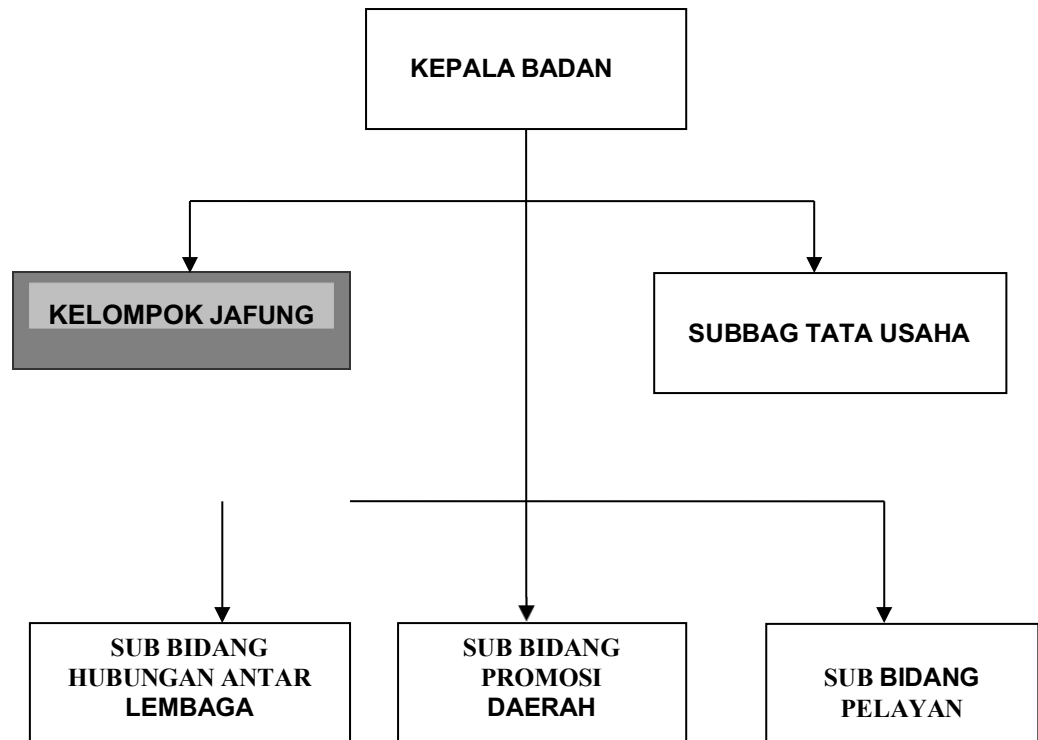
d. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Penghbug Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
4. Sub Bidang Promosi
5. Sub Bidang Pelayanan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian-bagian tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI JAKARTA



KEPALA BADAN MEMPUNYAI TUGAS-TUGAS ANTARA LAIN :

1. Penetapan program di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah, serta pelayanan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah, serta pelayanan;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang penghubung daerah;
4. Pembinaan dan pengarahan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah, serta pelayanan;
5. Penyelenggaraan kegiatan dibidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Badan;

7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang hubungan antar lembaga, promosi daerah serta pelayanan;
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan dibidang penghubung;
9. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan dibidang penghubung daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

SUB BAGIAN TATA USAHA MEMPUNYAI TUGAS-TUGAS ANTARA LAIN :

1. Penyusunan dan penyelarasan program kerja Badan serta tata usaha keuangan, asset, aparatur, dan administrasi umum;
2. Pelaksanaan tata usaha keuangan;
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi dan tatalaksana Badan, penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan;
4. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
5. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyiapan serta pemeliharaan peralatan dan asset serta rumah tangga Badan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
7. Pelaksanaan tugas lain dibidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala Badan.

SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA MEMPUNYAI TUGAS :

1. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang hubungan antar lembaga di Jakarta dan daerah lainnya;

4. Pelaksanaan hubungan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah lainnya serta instansi terkait lainnya di Jakarta dan daerah lainnya;
5. Pengelolaan sarana dan prasarana hubungan antar lembaga;
6. Penyediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas eksekutif dan legislatif pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jakarta dan daerah lainnya;
7. Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan di bidang hubungan antar lembaga;
8. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang hubungan antar lembaga;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang hubungan antar lembaga;
10. Pelaksanaan tugas lain di bidang hubungan antar lembaga yang diserahkan oleh Kepala Badan.

SUB BIDANG PROMOSI MEMPUNYAI TUGAS-TUGAS ANTARA LAIN :

1. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Promosi Daerah;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan promosi daerah;
3. Penyiapan bahan-bahan promosi daerah;
4. Pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan informasi sebagai bahan promosi daerah di Jakarta dan daerah lainnya;
5. Memfasilitasi kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta;
6. Pengelolaan sarana dan prasarana promosi melalui media elektronik dan non elektronik;
7. Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan dibidang promosi daerah;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang promosi daerah;
9. Pelaksanaan tugas lain di bidang promosi daerah yang diserahkan oleh Kepala Badan

SUB BIDANG PELAYANAN MEMPUNYAI TUGAS ANTARA LAIN ;

1. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pelayanan;
2. Pelaksanaan pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
3. Penyediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas eksekutif dan legislatif pemerintah provinsi kabupaten/kota di Jakarta dan daerah lainnya;
4. Pembinaan masyarakat dan mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
5. Pengelolaan mess daerah dan asrama Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
6. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelayanan;
7. Pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah PNS dalam jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan ketrampilan tertentu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan Pegawai Jabatan Fungsional ini dijabat oleh pegawai fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

e. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber daya aparatur yang bertugas pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta per 31 Desember 2022 sebanyak 33 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan pangkat / golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

**TABEL 2.1
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN KEPANGKATAN**

NO	URAIAN	POSISI PER 31 DESEMBER 2022
1	2	3
1.	Golongan IV/b	1 orang
2.	Golongan III/d	7 orang
3.	Golongan III/c	2 orang
4.	Golongan III/b	6 orang
5.	Golongan III/a	2 orang
6.	Golongan II/d	5 orang
7.	Golongan II/c	1 orang
8.	Golongan II/b	3 orang
9.	Golongan II/a	5 orang
9.	Golongan I/c	1 orang
JUMLAH		33 orang

**TABEL 2.2
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN ESELON**

NO.	URAIAN	POSISI PER 31 DESEMBER 2022
1.	Pejabat Struktural Eselon III Eselon IV	1 orang 4 orang
2.	Staf	28 orang
JUMLAH		33 orang

TABEL 2.3
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	URAIAN	POSISI PER 31 DESEMBER 2022
1	2	3
1.	S3	-
2.	S2	1 orang
3.	S1	12 orang
4.	D4	1 orang
5.	Sarmud / D3	5 orang
6.	SLTA	12 orang
7.	SLTP	1 orang
8.	SD	1 orang
	JUMLAH	33 orang

f. SUMBER DAYA KEUANGAN

1. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah yang bersumber dari sewa Mess Pemprov Kalimantan Barat melalui Badan Penghubung di Jakarta sebagai berikut :

TABEL 2.4
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JENIS PENDAPATAN	TAHUN 2022	KETERANGAN
1.	Penerimaan Mess Pemda	170.000.000,00	Setor ke Kas Daerah
	JUMLAH	170.000.000,00	

2. Anggaran Tahun 2022 Badan Penghubung sebesar Rp. 6.533.166.903,00 dengan perincian sebagai berikut :

TABEL 2.5
ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN LANGSUNG
TAHUN 2022

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN
A.	1.20.1.20.09.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.206.707.290,00
B.	1.20.1.20.09.01	BELANJA LANGSUNG	3.326.459.613,00
1.	1.20.1.20.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.470.497.000,00
2.	1.20.1.20.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	632.697.500,00

3.	1.20.1.20.09.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	21.040.000,00
5.	1.20.1.20.09.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	193.682.000,00
6.	1.20.1.20.09.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	133.816.900,00
7.	1.20.1.20.09.01.15	Program Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemda	195.076.213,00
8.	1.20.1.20.09.01.16	Program fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Pemda	679.650.000,00
TOTAL			6.533.166.903,00

2. ASPEK SARANA / PRASARANA

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan didukung oleh sarana dan prasarana yang merupakan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta. Adapun sarana dan prasarana tersebut dapat digolongkan sebagai asset bergerak dan asset tidak bergerak sebagai berikut :

TABEL 2.6
SARANA DAN PRASARANA

NO	JENIS SARANA/PRASARANA	JLH	KETERANGAN
----	------------------------	-----	------------

1.	Asset Tidak Bergerak		
	Gedung Kantor + Mess		
	a. Gedung Kantor	1 1 1 1 1	Ruang Kepala Badan Ruang Rapat Ruang Kerja Ruang Tamu Garasi
	b. Mess	4 1 8 1	Kamar VIP A (Kapasitas 1 Org) Kamar VIP B (Kapasitas 2 Org) Kamar VIP C (Kapasitas 4 Org) Kamar Standart (Kapasitas 10 Org)
	c. Bangunan Asrama	13	Tersebar di 8 Kota di Pulau Jawa : Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Yogya, Malang, Surabaya
	d. Bangunan Khusus	1	Anjungan Daerah Kalbar Taman Mini Indonesia Indah
2.	Asset yang Bergerak		
	a. Kendaraan Roda Empat	6	Mobil Operasional (Penunjang kegiatan protokoler)

3. ASPEK PELAYANAN URUSAN WAJIB

Beberapa indikator yang dapat mengidentifikasi tingkat kemajuan pelayanan bidang urusan wajib yang dilaksanakan melalui 7 program kegiatan sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 2.7
TARGET DAN REALISASI PROGRAM SKPD**

NO	URAIAN SPM	TARGET TAHUN 2022			CAPAIAN TAHUN 2022	
		VOLUME	SATUAN RP	%	REALISASI RP	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15 Keg	1.470.497.000	100	1.436.701.479,08	97,70
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	19 Keg	632.697.500	100	618.045.427	97,68
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2 Keg	21.040.000	100	20.480.000	97,33
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5 Keg	193.682.000	100	183.697.322	94,84
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6 Keg	133.816.900	100	119.227.793	89,09
6.	Program Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemda	1 Keg	195.076.213	100	176.491.613	90,47
7.	Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan	5 Keg	679.650.000	100	670.330.343	98,62

	Kegiatan Pemda					
	JUMLAH	53 Keg	3.326.459.613	100	3.224.973.977,08	96.95

Realisasi dari pelaksanaan untuk masing – masing urusan wajib pada tahun 2022 untuk program fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pemda yaitu 98,84%, program pelayanan administrasi perkantoran yaitu 97.71 %, pada urutan ketiga yaitu program peningkatan disiplin aparatur yaitu 97,37 % dan selanjutnya program peningkatan sarana dan prasarana 96.43 %, untuk program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yaitu 94.97 %, program peningkatan partisipasi dan kemitraan antar sektor dan pemda yaitu 90.47 % dan selanjutnya dan yang terakhir program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan yaitu 89.09 % .

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja pada tahun 2022 melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

TABEL 2.8
PROGRAM, KEGIATAN SERTA RINCIAN ANGGARAN BELANJA
DAN REALISASI URUSAN WAJIB BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

I. 1.20.1.20.09.01.01 : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								
NO	URUSAN WAJIB	ANGGARAN BELANJA (Rp)	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8	9 (8/7)
1.	01 Penyediaan	3.450.000	-	3.433.000	-	3.433.000	3.433.000	99.51

	Jasa Surat Menyurat							
2.	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDAir dan listrik	377.465.000	-	354.705.714	-	354.705.714	354.705.714	99,51
3.	03 Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah	55.000.000	-	52.015.202,08	-	52.015.202,08	52.015.202,08	94,57
4.	04 Penyediaan Jasa Perijinan Kendaraan dinas/operasional	20.300.000	-	18.889.400	-	18.889.400	18.889.400	93,05
5.	05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3.160.000	-	2.978.000	-	2.978.000	2.978.000	94,24
6.	07 Penyediaan Alat Tulis Kantor	33.635.000	-	33.602.000	-	33.602.000	33.602.000	99,90
7.	08 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.825.000	-	45.759.800	-	45.759.800	45.759.800	99,86
8.	09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.080.000	-	20.055.000	-	20.055.000	20.055.000	99,88
9.	10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.700.000	-	22.678.000	-	22.678.000	22.678.000	99,90
10.	11 Penyediaan Perlengkapan/peralatan Rumah Tangga	19.895.500	-	19.890.500	-	19.890.500	19.890.500	98,97
11.	12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	-	5.850.000	-	5.850.000	5.850.000	97,50
12.	13 Penyediaan makanan	12.650.000	-	12.500.000	-	12.500.000	12.500.000	98,86

	dan minuman							
13.	14 Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	364.507.500	-	363.984.463	-	363.984.463	363.984.463	99.86
14.	15 Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	381.744.000	-	377.175.400	-	377.175.400	377.175.400	98.80
15.	20 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	104.085.000	-	103.185.000	-	103.185.000	103.185.000	99.14
II. 1.20.1.20.09.01.02 : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA								
NO	URUSAN WAJIB	ANGGARAN BELANJA (Rp)	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			PEMELIHARAAN	BARANG DAN JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8	9 (8/7)
16.	07 Pengadaan AC/Kipas Angin	22.450.000	-	-	22.100.000	22.100.000	22.100.000	98.44
17.	08 Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	83.800.000	-	-	83.050.000	83.050.000	83.050.000	99.11
18.	09 Pengadaan perlengkapan / peralatan rumah tangga	35.550.000	-	-	35.100.000	35.100.000	35.100.000	98.73
19.	11 Pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	12.375.000	-	-	12.150.000	12.150.000	12.150.000	98.18
20.	13 Pengadaan Sarana /Prasarana Pendukung Gedung Kantor	37.950.000	-	-	37.050.000	37.050.000	37.050.000	97.63
21.	15 Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor	30.375.000	29.780.000	-	-	29.780.000	29.780.000	98,04

22.	17 Pemeliharaan taman/halaman Kantor/halaman rumah jabatan	13.000.000	12.650.000	-	-	12.650.000	12.650.000	98,00
23.	18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	248.000.000	239.901.427	-	-	239.901.427	239.901.427	96.73
24.	20 Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin	35.550.000	33.817.500	-	-	33.817.500	33.817.500	95.13
25.	21 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	600.000	500.000	-	-	500.000	500.000	83.33
26.	43 Pengadaan Mesin Pompa Air	15.395.000	-	-	15.100.000	15.100.000	15.100.000	98,08
27.	60 Pemeliharaan rutin/berkala Saluran Air	900.000	900.000	-	-	900.000	900.000	100
28.	61 Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.907.500	1.907.500	-	-	1.907.500	1.907.500	100
29.	67 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan rumah tangga	4.250.000	4.250.000	-	-	4.250.000	4.250.000	100
30.	76 Rehabilitas/peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	34.850.000	34.850.000	-	-	34.850.000	34.850.000	100
31.	77 Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	55.745.000	54.939.000	-	-	54.939.000	54.939.000	98.55
III. 1.20.1.20.09.01.03 : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								
32.	02 Pengadaan pakaian khusus, perlengkapannya	19.000.000	-	18.500.000	-	18.500.000	18.500.000	97.37
33.	03 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	2.040.000	-	2.040.000	-	2.040.000	2.040.000	97,06
V. 1.20.1.20.09.01.05 : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								

34.	01 Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000	-	22.844.200	-	22.844.200	22.844.200	76.15
35.	02 Sosialisasi, Bimtek, workshop	29.100.000	-	29.098.522	-	29.098.522	29.098.522	99.99
36.	04 Pembinaan jasmani dan rohani	111.020.00 00	-	110.705.00 0	-	110.705.00 0	110.705.00 0	99.72
37.	05 Penyusunan analisis jabatan	14.446.000	-	12.185.500	-	12.185.500	12.185.000	84.32
38.	06 Penyusunan penetapan kinerja	9.116.000	-	8.869.100	-	8.869.100	8.869.100	97.29
VI. 1.20.1.20.09.01.06 : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								
39.	01 Penyusunan Laporan Keuangan	32.295.000	-	29.927.613	-	29.927.613	29.927.613	92.67
40.	02 Penyusunan LAKIP	10.894.000	-	10.894.000	-	10.894.000	10.894.000	100
41.	03 Penyusunan RENSTRA	13.940.000	-	9.311.200	-	9.311.200	9.311.200	66.79
42.	04 Penyusunan RENJA SKPD	26.936.000	-	25.993.000	-	25.993.000	25.993.000	96.50
43.	05 Penyusunan dan pelaporan LPPD & LKPJ	16.046.000	-	15.624.680	-	15.624.680	15.624.680	97.37
44.	07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	33.705.000	-	27.475.500	-	27.475.500	27.475.500	81.52
VII. 1.20.1.20.09.01.15 : PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KEMITRAAN ANTAR SEKTOR DAN PEMDA								
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8	9 (8/7)
45.	01 Fasilitasi Kegiatan Gubernur serta Pejabat Lainnya	195.076.21 3	-	176.491.61 3	-	176.491.61 3	176.491.61 3	90.47
VIII. 1.20.1.20.09.01.16 : PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN PEMDA								
46.	01 Peningkatan pelayanan Kedinasan Kantor Perwakilan dan ADKB TMII pada hari-hari libur/ kegiatan	73.920.000	-	72.101.950	-	72.101.950	72.101.950	97,54

	piket – piket hari libur							
47.	02 Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Daerah	111.590.00 0	-	111.122.00 0	-	111.122.00 0	111.122.00 0	99,58
48.	03 Pagelaran kesenian dan kebudayaan	193.760.00 0	-	192.017.00 0	-	192.017.00 0	192.017.00 0	99.10
49.	05 Penyediaan jasa penggunaan tanah, bangunan gedung	91.520.000	-	86.910.000	-	86.910.000	86.910.000	94.96
50.	06 Pengelolaan mess daerah	208.860.00 0	-	208.179.00 0	-	208.179.00 0	208.179.00 0	99.67
	JUMLAH	3.326.459.6 13	323.706.427	2.606.928.5 50,08	294.339.00 0	3.224.973.9 77,08	3.224.973.9 77,08	96.95

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan wajib yang merupakan prioritas (Core Bisnis) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

**1. Program : Pelayanan Penghubung
Kegiatan : Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.**

Program ini melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan guna penyampaian informasi atau koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintahan terkait di Jakarta dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi maupun Pejabat-Pejabat Pemda. Kegiatan ini menjadi prioritas utama untuk semua kegiatan kedinasan selama di Jakarta maupun daerah lain se jabotabek, baik yang dilaksanakan pada hari libur maupun hari-hari besar sesuai

dengan kegiatan /acara pada saat itu. Adapun permasalahan umum pada program ini sebagai berikut :

Permasalahan :

- a. Belum adanya networking dengan Kedutaan Besar Negara Asing di Jakarta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Kalimantan Barat secara umum. Hal ini menjadi tidak masalah karena dimungkinkan para pejabat telah menjalin networking secara langsung ke lembaga-lembaga Pemerintah se Jabotabek.
- b. Distribusi SDM yang masih dibutuhkan sebagai tenaga lapangan yang khusus dan menguasai semua Kelembagaan Pemerintahan se Jabotabek.
- c. Minimnya sarana dan prasarana / fasilitas kendaraan dinas yang terbatas, sehingga keterlambatan dapat terjadi dalam rangka penyampaian informasi atau Koordinasi dengan Lembaga-lembaga Pemerintah terkait se Jabotabek.
- d. Belum terlaksananya Diklat / pembekalan bagi SDM Hubungan Antar Lembaga untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam rangka meningkatkan hubungan interaksi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

1. Program : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Pemda

a. Kegiatan : Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah / Wakil dan Pejabat Daerah

Pengelolaan protokoler adalah salah satu kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan, merupakan kegiatan yang

diprioritaskan dalam rangka menunjang kegiatan para pejabat eksekutif dan legislatif se-Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya. Kegiatan Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala daerah / Wakil dan Pejabat Daerah menjadi sangat penting. oleh karena itu permasalahan yang memang harus diatasi adalah personil yang cakap, tanggap serta mampu untuk melakukan tugas keprotokolan

Permasalahan :

- 1) Terbatasnya kualitas SDM keprotokolan
- 2) Tidak adanya kegiatan Diklat Keprotokolan
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana kendaraan dinas dalam rangka memperlancar urusan keprotokolan.

b. Kegiatan : Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan

Permasalahan :

- 1) Belum Optimalnya pendayagunaan Anjungan Kalimantan Barat di Taman Mini Indonesia Indah sebagai show window bagi pariwisata dan budaya Kalimantan Barat di Jakarta. Hal ini lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah kekayaan budaya daerah yang ada di anjungan untuk dipromosikan.
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pagelaran kesenian dan kebudayaan.
- 3) Masih lemahnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya bidang seni budaya

secara optimal dan terpadu dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pagelaran kesenian dan kebudayaan.

- 4) Terbatasnya kualitas sumber daya dibidang seni budaya Kalbar yang kompeten dan mendukung kegiatan pagelaran kesenian dan kebudayaan.

c. Kegiatan : Penyediaan jasa penggunaan tanah, bangunan Gedung dan rumah, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan berupa fasilitasi pembayaran PBB asrama Mahasiswa.

Permasalahan :

- 1) Keterlambatan pembayaran dikarenakan dari pihak asrama yang kurang kooperatif
- 2) Belum optimalnya penerapan sistem perpajakan, mekanisme dan proses pelayanan pajak bagi asrama mahasiswa Kalimantan Barat.
- 3) Belum optimalnya koordinasi dan kesadaran pihak asrama terhadap kepatuhan pembayaran PBB.

d. Kegiatan : Pengelolaan Mess Daerah

merupakan kegiatan yang dapat memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat tiap tahunnya. Adapun permasalahan yang ada dapat diatasi sehingga meminimalisir keadaan yang kurang kondusif.

Permasalahan :

- 1) Terbatasnya SDM yang kompeten dalam urusan pengelolaan mess

- 2) Belum optimalnya penerapan sistem, mekanisme pengelolaan mess
- 3) Belum optimalnya ketersediaan data dalam rangka pengelolaan mess
- 4) Kurangnya promosi dalam rangka memperkenalkan mess daerah
- 5) Belum adanya pembinaan yang terukur terhadap kinerja pengelolaan mess
- 6) Kurangnya minat dan kesadaran para tamu untuk menginap di mes

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL

Perencanaan kerja merupakan proses penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk lima tahunan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program dan kegiatan yang telah diusulkan.

Review terhadap rancangan awal meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Selama Tahun 2022 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Telah merealisasikan Anggaran APBD Sebesar Rp. 6.359.753.688,08

yaitu sebesar 97.35 % dari total anggaran sebesar Rp. 6.533.166.903,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung : Rp. 3.134.779.711,00 (97.76 %)
2. Belanja langsung : Rp. 3.224.973.977 (96.95 %)
3. Belanja Barang dan jasa : Rp. 2.606.928.550,08
4. Belanja Modal : Rp. 294.339.000,00
5. Belanja Pemeliharaan : Rp. 323.706.427,00

Capaian angka partisipasi tahun 2022 sebesar 97.35 % sedangkan capaian program sesuai target anggaran sebesar 100 % ini berarti telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta sebagai tindak lanjut dan implementasi serta penjabaran dari kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bidang urusan pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah, hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan penyusunan perencanaan strategis yang tepat dalam program dan kegiatan yang harus dilaksanakan.

BAB III

PRIORITAS DAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (BADAN PENGHUBUNG)

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala – kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan.oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Perumusan program kerja di bidang penghubung
2. Perumusan kebijakan di bidang penghubung
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penghubung
4. Pengkoordinasian di bidang penghubung
5. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan
6. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penghubung
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penghubung
8. Penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga - lembaga lainnya di Jakarta dan daerah lainnya

9. Pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah Provinsi di Jakarta dan daerah lainnya
10. Pembinaan masyarakat, mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya
11. Pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan asrama mahasiswa dan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya
13. Pengelolaan anjungan daerah Provinsi Kalimantan Barat Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta dan daerah lainnya
14. Penunjang pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja Provinsi, Kabupaten / Kota meliputi sosial, budaya, ekonomi dan pariwisata berdasarkan kebijakan Gubernur
15. Pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi Pejabat Eksekutif dan Legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya
16. Penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah
17. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN KERJA

Berdasarkan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, maka tujuan dan sasaran program kegiatan Badan Penghubung dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

TABEL 3.1
HUBUNGAN VISI / MISI DAN TUJUAN / SASARAN PROGRAM
KEGIATAN

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik dan benar	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik dan benar	1. Terkirimnya Surat Selama 1 Tahun 2. Terpenuhinya Penyediaan Jasa Listrik, Telepon, Internet dan Air Kantor 3. Tersedianya Asuransi Bangunan dan Kendaraan 4. Tersedianya perizinan kendaraan dinas 5. Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan 6. Tersedianya alat tulis kantor 7. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Tersedianya Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
			9. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10. Tersedianya Perlengkapan /Peralatan Rumah Tangga 11. Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Bagi

			Pegawai dan Tamu
			12. Tersedianya makan dan minum Rapat dan Tamu Kantor
			13. Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
			14. Tersedianya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor
			15. Tersedianya Jasa penatausahaan keuangan dan barang
2.	Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas	MTerpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas	1. Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional
			2. Terlaksananya Pengadaan AC / Kipas Angin
			3. Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Kantor
			4. Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
			5. Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi
			6. Tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
			7. Tersedianya Gorden dan Karpet
			8. Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
			9. Terpeliharanya Taman dan Kolam

			10. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
			11. Terlaksananya Pemeliharaan AC dan Kipas Angin
			12. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Perkantoran
			13. Pemeliharaan Sarana Prasarana Komunikasi Studio
			14. Tersedianya Perlengkapan Seni di Anjungan Kalimantan Barat
			15. Tersedianya Mebelair
			16. Tersedianya Pompa Air
			17. Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Mahasiswa
			18. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air
			19. Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon
			20. Tersedianya Pemeliharaan Mebelair
			21. Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Pompa Air
			22. Tersedianya Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
			23. Terlaksananya Rehabilitasi Asrama

3.	Meningkatkan mutu dan disiplin kerja aparatur	Terlaksananya peningkatan mutu dan disiplin kerja aparatur	1. Tersedianya pakaian dinas kerja dan perlengkapannya bagi Pegawai
			2. Tersedianya Pakaian Khusus bagi Pegawai dan Petugas Keamanan
4.	Meningkatkan kualitas kinerja Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan kualitas kinerja sumber daya aparatur	1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil
			2. Terlaksananya sosialisasi dan Bimtek bagi PNS
			3. Terlaksananya Peningkatan Jasmani dan Rohani
			4. Penyusunan penetapan kinerja Badan Penghubung
5.	Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sistematis dan terukur	Terlaksananya sistem pelaporan capaian dan kinerja yang sistematis dan terukur	1. Tersedianya Penyusunan Laporan keuangan Tahunan OPD
			2. Tersedianya Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penghubung
			3. Tersusunnya RENSTRA Badan Penghubung
			4. Tersedianya Penyusunan RENJA Badan Penghubung
			5. Tersedianya Penyusunan Laporan LPPD dan LKPJ Badan Penghubung
			6. Tersedianya Penyusunan RKA dan DPA Tahun Anggaran 2019
			7. Tersedianya Pengelolaan Pengelolaan Pelayanan

			Informasi Dokumentasi
6.	Meningkatkan pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Terlaksananya pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	1. Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat lainnya
7.	Meningkatkan kualitas layanan penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Terlaksananya layanan penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	1. Terselenggaranya Kegiatan / Piket Hari – hari Libur 2. Terlaksananya Kegiatan Protokoler Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Daerah Lainnya 3. Terlaksananya Pagelaran kesenian dan kebudayaan 4. Terlaksananya Pembayaran PBB dan Sewa Asrama Mahasiswa 5. Terlaksananya pengelolaan mess daerah 6. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat 7. Terlaksana Pawai Budaya

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 – 2023 prioritas program kegiatan dikelompokkan kedalam dua prioritas program pembangunan yaitu :

- a. **Program Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemda (Badan Penghubung).**

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai melalui prioritas program tersebut, maka ditetapkan fokus-fokus prioritas yang terdiri dari :

**Kegiatan 1 : Meningkatnya Partisipasi dan Kemitraan antar
Sektor dan Pemda**

Untuk meningkatkan partisipasi dan kemitraan antar sektor dan pemda, salah satunya melalui fasilitasi kegiatan Gubernur serta pejabat lainnya. Dengan capaian program : Peningkatan partisipasi dan kemitraan antar sektor dan pemda target kinerja 100 %, keluaran Fasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat Lainnya dengan target capaian kinerja 15 Kali dalam 1 tahun. Kelompok sasaran Gubernur/Wakil Gubernur Pejabat lainnya dan Pegawai.

b. Program Peningkatan Layanan Penghubung

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai melalui prioritas program, maka ditetapkan fokus-fokus prioritas yang terdiri dari:

**Kegiatan 1 : Peningkatan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi
Kalimantan Barat dan Anjungan Kalimantan Barat TMII
pada hari - hari libur**

Untuk meningkatkan layanan penghubung pada prioritas program ini melalui kegiatan Piket hari-hari libur, dengan capaian program : Optimalnya pelayanan kedinasan dan pariwisata, target kinerja 100 %, keluarannya Jumlah pelayanan kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII pada hari – hari libur / kegiatan piket

hari hari libur, hasil yang diharapkan meningkatnya jumlah pelayanan kedinasan dan tamu pada hari – hari libur di Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat, dengan kelompok sasarannya adalah Pegawai, pejabat dan pengunjung dan target capaian kinerja 17 orang pegawai dalam 1 tahun.

Kegiatan 2 : Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah / Wakil dan Pejabat Daerah di Jabotabek.

Untuk meningkatkan layanan penghubung, salah satunya melalui pengelolaan protokoler dan perjalanan kepala daerah / wakil dan pejabat daerah. Dengan target kinerja 100 %, keluarannya Jumlah pengelolaan protokoler Kepala Daerah/Wk dan Pejabat Daerah di Jabodetabek, hasil yang diharapkan terwujudnya pelayanan protokoler Kepala Daerah/Wk dan Pejabat Daerah lainnya, kelompok sasarannya adalah pejabat dan pegawai, dengan target capaian kinerja 48 kali didalam 1 tahun.

Kegiatan 3 : Terselenggaranya kegiatan Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan

Untuk meningkatkan layanan penghubung pada prioritas program ini adalah melalui Pelaksanaan Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan, dengan target kinerja 100 %, keluarannya jumlah pagelaran kesenian dan kebudayaan dengan target kinerja mempromosikan kesenian dan kebudayaan Kalimantan Barat dengan target kinerja 100 %, kelompok sasarannya adalah Pegawai dan pengunjung, dengan target capaian kinerja 12 kali dalam 1 tahun.

Kegiatan 4 : Tersedianya Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung

Untuk meningkatkan layanan penghubung pada prioritas program ini adalah melalui kegiatan Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung dan Rumah, target kinerja 100 %, keluarannya Jumlah pembiayaan PBB dan sewa Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat dengan target kinerja 13 PBB dan 3 Sewa Gedung, hasil yang diharapkan Terpenuhinya kewajiban pembayaran PBB dan sewa Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat dengan target capaian kinerja 100 %, dengan kelompok sasarannya adalah asrama Mahasiswa.

Kegiatan 5 : Peningkatan kegiatan pengelolaan Mess Daerah

Untuk meningkatkan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pemda pada prioritas program ini adalah melalui kegiatan Pengelolaan Mess Daerah, dengan target kinerja 100 %, keluarannya jumlah pengelolaan mess daerah target kinerja 1 Mess Daerah, hasil yang diharapkan meningkatnya pelayanan pengelolaan mess daerah selama 1 tahun, dengan kelompok sasaran adalah Pegawai dan tamu mess, dengan target capaian kinerja 1 Mess dalam 1 tahun.

Kegiatan 6 : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat

Untuk meningkatkan layanan penghubung pada prioritas program ini adalah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat dengan target kinerja 100 %, keluarannya Jumlah

monitoring dan evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat, hasil yang diharapkan Terwujudnya pembinaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat dengan target capaian kinerja 16 Asrama, dengan kelompok sasarannya adalah Asrama Mahasiswa.

Kegiatan 7 : Terselenggaranya Pawai Budaya

Untuk meningkatkan layanan penghubung pada prioritas program ini adalah melalui Pawai Budaya, dengan target kinerja 100%, keluarannya jumlah kegiatan Pawai Budaya dengan target capaian kinerja 1 kali dengan kelompok sasarannya pegawai dan pengunjung.

TABEL 3.2

**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022**

NO	PRIORITAS PROGRAMBADAN PENGHUBUNG	KINERJA		PELAKSANA
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitasi kegiatan Gubernur serta Pejabat Lainnya	48 Kali	Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
2.	Program Pelayanan Penghubung	Jumlah Pelayanan kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat pada hari – hari	17 orang	Sub Bagian Tata Usaha

		Jumlah Pengelolaan Protokoler Kepala Daerah/Wk dan Pejabat Daerah di Jabodetabek	48 Kali	Sub Bidang Pelayanan
		Jumlah Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan	12 Kali	Sub Bidang Promosi Daerah
		Jumlah Pembiayaan PBB dan Sewa untuk Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat se-Jawa	13 PBB, 3 Sewa Gdg	Sub BagianTata Usaha
		Jumlah Pengelolaan Mess Daerah	1 Mess	Sub Bidang Pelayanan
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Asrama Kalimantan Barat	16 Asrama	Sub Bidang Pelayanan
		Jumlah kegiatan Pawai Budaya	1 Kali	Sub Bidang Promosi Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

KOD E	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR / PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	WAJIB				7.300.000.000			19.008.000.000
3.17	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PERANGKAT DAERAH, KEPENGAWAIAN DAN PERSANDIAN				7.300.000.000			19.008.000.000
3.17.01	BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR				7.300.000.000			19.008.000.000

3.17.01.01	BADAN PENGHUBUNG PROV.KALBAR				7.300.000.000			19.008.000.000
3.17.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik dan Benar			1.697.435.000			1.687.357.500
3.17.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	Jakarta	1 Tahun	17.525.000		200 Kali	12.000.000
3.17.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik Dan Air	Jumlah kebutuhan listrik, telepon ,internet dan air selama 1 tahun	Jakarta	1 Tahun	364.280.000		4 Jenis	364.280.000
3.17.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah asuransi dan bangunan dan kendaraan selama 1 tahun	Jakarta	2 Bangunan & 7 Unit Kend	66.000.000		2 Bangunan & 6 Unit Kend	58.500.000
3.17.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kend.Dinas / Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun	Jakarta	12 Buah STNK	19.400.000		9 Buah STNK	14.500.000
3.17.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kebutuhan administrasi keuangan dan jasa administrasi keuangan selama 1 tahun	Jakarta	3 Jenis	4.460.000		3 Jenis	7.086.000
3.17.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun	Jakarta	40 Jenis	39.135.000		40 Jenis	37.892.000
3.17.01.01.08	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jakarta	15 Jenis	59.405.000		13 Jenis	52.080.000
3.17.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jakarta	11 Jenis	19.050.000		10 Jenis	15.450.000
3.17.								

3.17. 01.0 1.01. 10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	Jakarta	18 Jenis	31.025.000		16 Jenis	26.955.000
3.17. 01.0 1.01. 11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Jakarta	40 Jenis	23.452.500		40 Jenis	25.518.000
3.17. 01.0 1.01. 12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jakarta	3 Surat Kabar	7.020.000		3 Surat Kabar	7.020.000
3.17. 01.0 1.01. 13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum selama 1 tahun	Jakarta	1 Tahun	19.700.000		2 Jenis	19.100.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR / PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.17. 01.0 1.01. 14	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 1 tahun	Jakarta Pontianak dan Kota Lainnya	1 Tahun	240.006.000		1 Tahun	260.000.000
3.17. 01.0 1.01. 15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan /Rumah Jabatan dan Pendukung lainnya	Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor	Jakarta	15 Orang	679.891.500		15 Orang	679.891.500
3.17. 01.0 1.01. 16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jakarta	14 Orang	107.085.000		14 Orang	107.085.000

3.17. 3.17. 01.0 1.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor			3.876.067.00 0			15.393.267.5 00
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasi onal	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas/Opera sional	Jakarta	1 Unit	375.290.000		2 Unit Sepeda Motor	52.800.000
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 07	Pengadaan AC / Kipas Angin	Jumlah Pengadaan AC / Kipas Angin	Jakarta	5 Unit	30.800.000		2 Unit	12.450.000
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkap an / Peralatan Kantor	Jakarta	15 Unit (2 unit mesin absensi, 1 bh locker,1 bh papan bezetting , 1 bh papan struktur organisa si,1 Filling Kabinet,5 unit komputer PC, 1 unit Laptop,3 unit printer)	155.400.000		3 Jenis (Mesin Fotocopy , Laptop, Printer)	49.150.000
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkap an / Peralatan Rumah Tangga	Jakarta	7 Buah (1 bh lemari hias, 1 set tempat tidur, 2 bh dispense r, 2 bh kulkas, 1 bh ricecook er)	38.700.000		3 Jenis (Tempat Tidur, Kursi Tamuh, Rempel Meja)	36.652.500
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah pengadaan peralatan studio komunikasi	Jakarta	3 Jenis (1 unit soundsys tem dan 2 unit proyektor)	105.800.000		4 Jenis (Handyca m, Keyboar d, Micropho ne,	39.700.000

							Megaphone speaker)	
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	Jakarta	1 Paket	10.145.000		-	-
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	Jakarta	2 Jenis	46.401.000		1 Jenis (Gorden)	97.547.000
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	Jakarta	1 Gedung	56.870.000		1 Gedung	30.075.000
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 17	Pemeliharaan Taman/ Lahan Kantor/ Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Taman dan Kolam	Jakarta	2 Lokasi	13.000.000		2 Lokasi	13.500.000

KOD E	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR / PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019			CATATAN PENJELASAN	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik	Jakarta	7 UnitKendaraan Roda Empat	251.666.000		5 Unit Kendaraan Roda Empat dan 2 Unit Kendaraan Roda Dua	263.589.200
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 20	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah pemeliharaan AC / Kipas Angin	Jakarta	44 Unit AC dan 2 Kipas Angin	35.550.000		37 Unit AC	29.950.000
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan Peralatan Kantor	Jakarta	5 Jenis (Komputer, PC, Laptop, Printer,	14.000.000		5 Jenis (Komputer, PC, Laptop, Printer,	14.000.000

				Mesin Tik, Mesin Photo Copy)			Mesin Tik, Mesin Photo Copy)	
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Jakarta	17 Unit	23.800.000		16 Unit	16.300.000
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 39	Pengadaan Perlengkapan /Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus	Jumlah pengadaan perlengkapan Seni di Anjungan Kalimantan Barat	Jakarta	5 Jenis Pakaian adat dan 3 jenis aksesoris	40.245.000		9 Jenis	75.345.000
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 42	Pengadaan Mebelair	Jumlah Pengadaan Mebelair	Jakarta	14 Unit	32.000.000		3 Jenis	9.950.000
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah Pengadaan Mesin Pompa Air	Jakarta	1 Unit	7.595.000		2 Unit	20.895.000
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah Pemeliharaan Mess/Asrama	Jakarta	1 Paket	99.955.000		1 Paket	100.000.000
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 60	Pemeliharaan Rutin/Berkala Saluran Air	Jumlah Pemeliharaan Saluran Air	Jakarta	1 Tahun	2.000.000		4 Kali	2.000.000
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jakarta	1 Tahun	12.000.000		2 Jenis	12.000.000
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah pemeliharaan Mebelair	Jakarta	4 Set Sofa	12.000.000		4 Set Sofa	12.000.000
3.17. 3.17. 01.0 1.02. 66	Pemeliharaan rutin/ berkala Mesin Pompa Air	Jumlah pemeliharaan Mesin Pompa Air	Jakarta	7 Buah	3.500.000		7 Buah	3.500.000
3.17.	Pemeliharaan	Jumlah pemeliharaan	Jakarta	9 Tabung	9.350.000		9 Tabung	9.350.000

3.17. 01.0 1.02. 67	Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	n Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		dan 13 Buah			dan 13 Buah	
3.17. 01.0 1.02. 70	Rehabilitasi /Peningkatan Mess / Asrama	Jumlah Rehabilitasi Asrama	Malang , Yogyakarta, Bogor, Solo	4 Asrama Mahasiswa	2.500.000.00 0		7 Asrama Mahasiswa	13.393.013.8 00
3.17. 01.0 1.02. 71	Rehabilitasi/Pe ningkatan Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Gedung	Jakarta				1 Paket	100.000.000
3.17. 01.0 1.02. 76	Rehabilitasi/Pe ningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus/ Konstruksi khusus	Jumlah Rehabilitasi Anjungan Kalimantan Barat TMII	Jakarta				1 Paket	1.000.000.00 0
3.17. 01.0 1.03 1.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase meningkatn ya disiplin Aparatur			42.000.000			38.500.000
3.17. 01.0 1.03. 01	Pengadaan Pakaian Dinas/ Kerja dan Perlengkapann ya	Jumlah Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkap an Bagi Pegawai	Jakarta	33 stel	16.500.000		31 Stel	15.150.000
3.17. 01.0 1.03. 02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapann ya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus bagi Pegawai dan Petugas Keamanan	Jakarta	51 Stel	25.500.000		31 Stel	23.000.000
3.17. 01.0 1.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase meningkatn ya kapasitas Sumber Daya Aparatur			222.260.000			255.878.000
3.17. 01.0 1.05. 01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pendidikan dan pelatihan PNS di Badan Penghubung	Jakarta ,Pontianak dan Kota Lainnya	1 Tahun	20.000.000		3 Kali	20.000.000
3.17.								

3.17.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Sosialisasi dan Bimbingan teknis, workshop	Jakarta, Pontianak, dan Kota Lainnya	1 Tahun	35.000.000		2 Jenis	35.500.000
3.17.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Peningkatan pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai di Badan Penghubung	Jakarta dan Kota Lainnya	1 Tahun	157.882.000		1 Tahun	191.300.000
3.17.01.01.05.06	Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja Badan Penghubung	Jakarta dan Pontianak	4 Buku	9.378.000		4 Buku	9.578.000
3.17.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusut tepat waktu			156.433.000			191.598.000
3.17.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan Tahunan OPD	Jakarta dan Pontianak	10 Laporan	33.475.000		10 Laporan	34.075.000
3.17.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD dalam 1 Tahun Anggaran	Jakarta dan Pontianak	4 Buku	17.748.000		4 Buku	19.798.000
3.17.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Jumlah RENSTRA Badan Penghubung	Jakarta dan Pontianak	4 Buku	23.570.000		4 Buku	26.100.000
3.17.01.01.06.04	Penyusunan RENJA	Jumlah RENJA Badan Penghubung	Jakarta dan Pontianak	4 Buku	20.885.000		4 Buku	24.120.000
3.17.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	Jakarta dan Pontianak	8 Buah Dokumen	17.126.000		8 Buah Dokumen	17.526.000
3.17.01.01.01.0	Penyusunan RKA SKPD dan DPA	Jumlah RKA, DPA SKPD	Jakarta dan Pontianak	8 Buah Dokumen	34.986.000		8 Buah Dokumen	34.986.000

1.06.07	SKPD		ak	n			n	
3.17.3.17.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jakarta dan Pontianak	3 Laporan	8.643.000		12 Laporan	34.993.000
3.17.3.17.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KEMITRAAN ANTAR SEKTOR DAN PEMDA	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Pemda			250.990.000			238.260.000
3.17.3.17.01.01.02.70	Fasilitasi Kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur dan Pejabat lainnya	Jumlah Fasilitasi Gubernur/Wakil Gubernur dan Pejabat lainnya	Jakarta dan Daerah Lainnya	12 Bulan	250.990.000		12 Kali	238.260.000
3.17.3.17.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGHUBUNG	Persentase penyelenggaraan Layanan Penghubung			1.054.815.000			1.203.139.000
3.17.3.17.01.01.16.01	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII pada hari-hari libur/Kegiatan piket hari-hari libur	Jumlah pelayanan kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan barat TMII pada hari libur /kegiatan piket hari hari libur	Jakarta	1 Tahun	65.814.000		17 orang	65.814.000
3.17.3.17.01.01.16.02	Pengelolaan Protokol dan Perjalanan Kepala Daerah/Wk dan Pejabat Daerah di Jabodetabek	Jumlah pengelolaan protokol Kepala Daerah/Wk dan Pejabat Daerah di Jabodetabek	Jakarta	1 Tahun	178.700.000		48 Kali	167.900.000
3.17.3.17.01.01.16.03	Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan	Jumlah Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan	Jakarta	1 Tahun	293.500.000		12 Kali	287.320.000
3.17.3.17.01.01.16.04	Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung	Jumlah Pembiayaan PBB dan Sewa Asrama Mahasiswa	Jakarta	13 PBB dan 3 Sewa Gedung	256.260.000		13 PBB dan 4 Sewa Gedung	353.724.000

		Kalimantan Barat						
3.17. 3.17. 01.0 1.16. 05	Pengelolaan Mess Daerah	Jumlah Pengelolaan Mess daerah	Jakarta	1 Tahun	260.541.000		1 Mess	244.836.000
3.17. 3.17. 01.0 1.16. 06	Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat	Jumlah monitoring dan evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat	Jakarta dan Kota Lainnya	-	-		16 Asrama	35.495.000
3.17. 3.17. 01.0 1.16. 07	Pawai Budaya	Jumlah kegiatan Pawai Budaya	Jakarta				1 Kali	48.050.000
	JUMLAH				7.300.000.000			19.008.000.000

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta, Pada tahun 2023 pagu indikatif di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.6.400.510.631,00,- (Enam Milyar Empat Ratus Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dan pada tahun 2022 pagu indikatif sebesar Rp.6.252.770.076,00,- (Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp.147.740.555,00,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dari tahun 2022.

Rencana Kerja tahun 2023 pada Badan Penghubung disesuaikan dengan pagu indikatif yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan rencana kerja serta sangat menentukan pencapaian target kinerja Renstra Tahun 2018 – 2023.

Selanjutnya dalam penyampaian Rencana kerja ini juga dibahas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan, Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2022, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Badan

Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

Pencapaian kinerja program kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat tidak terlepas dari aspek Kelembagaan serta kualitas SDM yang sesuai dengan tugas dan fungsi, dukungan dan peranan aktif yang maksimal dan paling menentukan keberhasilan dan kualitas kerja Perangkat Daerah. Selain itu hal ini juga disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- Ø Etos kerja, kedisiplinan dan loyalitas
- Ø Kemampuan teknis dan profesionalisme personil / aparatur
- Ø Mekanisme reward and punishment yang proporsional
- Ø Aspek kesejahteraan dan pengembangan karier

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 ini disesuaikan dengan sistematika yang telah ditentukan. Renja ini tentunya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan dan pedoman dalam upaya peningkatan kinerja Perangkat Daerah kedepan.

Demikian Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon periksa adanya.

Jakarta, 16 Januari 2023

Kepala Badan Penghubung Provinsi
Kalimantan Barat



ABDUL GANIS.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197208211997031006